



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan.
 7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
 8. Dihapus.
 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 6
- (1) Tingkat Penggunaan Jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan ;
 - (2) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa (TP) dengan tarif retribusi (TR) atau dengan formula dasar sebagai berikut :
 $RPMT = TP \times TR$

(2) Tingkat penggunaan jasa (TP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.

(3) Tarif retribusi (TR) sebagaimana disebutkan pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang yang didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan yang dihitung seperti tabel berikut :

Komponen	Jumlah	Standar Biaya (Rp)	Satuan	Jumlah Kunjungan	Volume (Rp)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)x(2)x(4)
Honorarium Petugas	2	250.000	(oh)	1	500.000
Transportasi	2	30.000	(f)	1	60.000
Uang Makan	2	50.000	(oh)	1	100.000
ATK	1	50.000	(f)	1	50.000
				Tarif	710.000

(4) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi juga memperhitungkan Indeks Zonasi (IZ), Indeks Ketinggian Menara Telekomunikasi (IK), Indeks Jenis Menara Telekomunikasi (IM) dan Indeks Jarak Tempuh (IJ) sehingga besaran retribusi menara telekomunikasi untuk masing-masing menara dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$RPMT = TP \times TR \times ((IZ+IK+IM+IJ)/4)$$

(5) Indeks Zonasi (IZ) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :

- a. Indeks Zonasi I adalah bangunan menara yang berada di area terbuka seperti hutan/perkebunan dengan angka indeks (IZ=1);
- b. Indeks Zonasi II adalah bangunan menara yang berada pada daerah pedesaan dengan angka indeks (IZ= 1,5) ; dan
- c. Indeks Zonasi III adalah bangunan menara yang berada pada daerah perkotaan dengan angka indeks (IZ=2).

(6) Indeks Ketinggian (IK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dari perletakan / landasan menara, meliputi :

- a. Ketinggian I adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian 6 sampai dengan 20 meter dengan angka indeks (IK=1) ;
 - b. Ketinggian II adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian 21 sampai dengan 40 meter dengan angka indeks (IK=1,25);
 - c. Ketinggian III adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian 41 sampai dengan 60 meter dengan angka indeks (IK=1,5) ;
 - d. Ketinggian IV adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian 61 sampai dengan 80 meter dengan angka indeks (IK=1,75) ; dan
- (7) Indeks Jenis Menara (IM) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi : menara telekomunikasi yang dimiliki dan digunakan hanya oleh 1 (satu) operator dengan angka indeks (IM=2), dan menara telekomunikasi yang dimiliki Perusahaan Penyedia Menara Telekomunikasi dan digunakan oleh lebih dari satu operator telekomunikasi dengan angka indeks (IM=1).
- (8) Indeks jarak tempuh (IJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. jarak tempuh jarak jauh dengan angka indeks (IJ=2);
 - b. jarak tempuh jarak sedang dengan angka indeks (IJ=1,5) ; dan
 - c. jarak tempuh dalam kota dengan angka indeks (IJ=1).
- (9) Perhitungan besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk masing-masing menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada tabel berikut :

Indeks Zonasi	Ketinggian	Jenis Menara	Jarak Tempuh	Retribusi Terutang / Kunjungan	RT/Tahun (8 FR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = $((1+2+3+4)/4) \times \text{Tarif}$	(6) = (5) x 8 bln
1	1	1	1	710,000	5,680,000
1	1	1	1.5	798,750	6,390,000
1	1	1	2	887,500	7,100,000
1	1	2	1	887,500	7,100,000
1	1	2	1.5	976,250	7,810,000
1	1	2	2	1,065,000	8,520,000
1	1.25	1	1	754,375	6,035,000
1	1.25	1	1.5	843,125	6,745,000
1	1.25	1	2	931,875	7,455,000

1	1.25	2	1	931,875	7,455,000
1	1.25	2	1.5	1,020,625	8,165,000
1	1.25	2	2	1,109,375	8,875,000
1	1.5	1	1	798,750	6,390,000
1	1.5	1	1.5	887,500	7,100,000
1	1.5	1	2	976,250	7,810,000
1	1.5	2	1	976,250	7,810,000
1	1.5	2	1.5	1,065,000	8,520,000
1	1.5	2	2	1,153,750	9,230,000
1	1.75	1	1	843,125	6,745,000
1	1.75	1	1.5	931,875	7,455,000
1	1.75	1	2	1,020,625	8,165,000
1	1.75	2	1	1,020,625	8,165,000
1	1.75	2	1.5	1,109,375	8,875,000
1	1.75	2	2	1,198,125	9,585,000
1	2	1	1	887,500	7,100,000
1	2	1	1.5	976,250	7,810,000
1	2	1	2	1,065,000	8,520,000
1	2	2	1	1,065,000	8,520,000
1	2	2	1.5	1,153,750	9,230,000
1	2	2	2	1,242,500	9,940,000
1.5	1	1	1	798,750	6,390,000
1.5	1	1	1.5	887,500	7,100,000
1.5	1	1	2	976,250	7,810,000
1.5	1	2	1	976,250	7,810,000
1.5	1	2	1.5	1,065,000	8,520,000
1.5	1	2	2	1,153,750	9,230,000
1.5	1.25	1	1	843,125	6,745,000
1.5	1.25	1	1.5	931,875	7,455,000
1.5	1.25	1	2	1,020,625	8,165,000
1.5	1.25	2	1	1,020,625	8,165,000
1.5	1.25	2	1.5	1,109,375	8,875,000
1.5	1.25	2	2	1,198,125	9,585,000
1.5	1.5	1	1	887,500	7,100,000
1.5	1.5	1	1.5	976,250	7,810,000
1.5	1.5	1	2	1,065,000	8,520,000
1.5	1.5	2	1	1,065,000	8,520,000
1.5	1.5	2	1.5	1,153,750	9,230,000
1.5	1.5	2	2	1,242,500	9,940,000
1.5	1.75	1	1	931,875	7,455,000
1.5	1.75	1	1.5	1,020,625	8,165,000

1.5	1.75	1	2	1,109,375	8,875,000
1.5	1.75	2	1	1,109,375	8,875,000
1.5	1.75	2	1.5	1,198,125	9,585,000
1.5	1.75	2	2	1,286,875	10,295,000
1.5	2	1	1	976,250	7,810,000
1.5	2	1	1.5	1,065,000	8,520,000
1.5	2	1	2	1,153,750	9,230,000
1.5	2	2	1	1,153,750	9,230,000
1.5	2	2	1.5	1,242,500	9,940,000
1.5	2	2	2	1,331,250	10,650,000
2	1	1	1	887,500	7,100,000
2	1	1	1.5	976,250	7,810,000
2	1	1	2	1,065,000	8,520,000
2	1	2	1	1,065,000	8,520,000
2	1	2	1.5	1,153,750	9,230,000
2	1	2	2	1,242,500	9,940,000
2	1.25	1	1	931,875	7,455,000
2	1.25	1	1.5	1,020,625	8,165,000
2	1.25	1	2	1,109,375	8,875,000
2	1.25	2	1	1,109,375	8,875,000
2	1.25	2	1.5	1,198,125	9,585,000
2	1.25	2	2	1,286,875	10,295,000
2	1.5	1	1	976,250	7,810,000
2	1.5	1	1.5	1,065,000	8,520,000
2	1.5	1	2	1,153,750	9,230,000
2	1.5	2	1	1,153,750	9,230,000
2	1.5	2	1.5	1,242,500	9,940,000
2	1.5	2	2	1,331,250	10,650,000
2	1.75	1	1	1,020,625	8,165,000
2	1.75	1	1.5	1,109,375	8,875,000
2	1.75	1	2	1,198,125	9,585,000
2	1.75	2	1	1,198,125	9,585,000
2	1.75	2	1.5	1,286,875	10,295,000
2	1.75	2	2	1,375,625	11,005,000
2	2	1	1	1,065,000	8,520,000
2	2	1	1.5	1,153,750	9,230,000
2	2	1	2	1,242,500	9,940,000
2	2	2	1	1,242,500	9,940,000
2	2	2	1.5	1,331,250	10,650,000
2	2	2	2	1,420,000	11,360,000

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Nopember 2016

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :
(17,99/2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, upaya dan usaha meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pembiayaan adalah sangat mutlak diperlukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Penjelasan pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga perlu diadakan perubahan dalam Peraturan Daerah.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tabanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2012 yang menetapkan besaran tarif sebesar 2% (dua persen) yang mengambil dari penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 17